

LAPORAN

**HASIL PELAKSANAAN SURVEI
PERSEPSI KORUPSI PADA
PENGADILAN NEGERI KAB.
KEDIRI**

**TRIWULAN II
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

BABI	1
PENDAHULUAN	1
1.1. LatarBelakang	1
1.2. MaksudDanTujuan.....	2
1.3. LandasanHukum.....	2
1.4. RencanaKerja	3
BABII	4
METODOLOGI	4
2.1. MetodePenelitian	4
2.2. PopulasiDanSampel.....	4
2.3. Lokasi Penelitian DanUnitAnalisis	4
2.4. Teknik Pengumpulan Data DanQualityControl	5
2.5. TeknikAnalisisData	5
2.6. Tahapanpelaksanaan	6
BABIII	8
INDEKSPERSEPSIKORUPSI	8
3.1. Profilresponden	8
3.2. Indeks persepsi korupsisiperindikator.....	9
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerjapadapengadilan	14
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayananSatuan Kerja pada pengadilan	15
BABIV	17
PENUTUP	17
4.1. Kesimpulan	17
4.2. Rekomendasi.....	17
LAMPIRAN	
KUESIONER	

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT, telah disusun Laporan Survey Persepsi Korupsi di Pengadilan Negeri Kab. Kediri Kelas IA TRIWULAN II tahun 2022 ini.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam perbaikan pelayanan public yang berorientasi wilayah bebas dari korupsi adalah dengan melakukan Survey Persepsi Korupsi kepada pengguna layanan pengadilan. Dalam survey ini data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrument kuesioner yang diisi tanpa melakukan tatap muka. Survey dilakukan kepada para pengunjung dan pengguna layanan Pengadilan Negeri Kab. Kediri Kelas IA.

Sebagai pertanggungjawaban atas Kinerja Tim Survey maka disusun laporan ini yang dimaksud untuk memberikan informasi bahwa Pengadilan Negeri Kab. Kediri Kelas IA mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil.

Semoga hasil Survey ini dapat membantu memberikan masukan yang positif bagi Pengadilan Negeri Kab. Kediri Kelas IA dan sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna layanan Pengadilan serta sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja organisasi agar dapat terwujudnya wilayah bersih dari korupsi.

Demikian Laporan Survey Persepsi Korupsi pada pengadilan Negeri Kab. Kediri Kelas IA semester II tahun 2022 ini disusun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 11 Juli 2022
Ketua Tim.

Mengetahui
Pembina Pembangunan Zona Integritas
Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri



ASEP KOSWARA, SH., MH.
NIP. 19681208 100403 1 001

H. RADEN WIYONO., SH., MH.
NIP. 19630703 198803 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LatarBelakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner melalui aplikasi siSUPER.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri/Tinggi

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan QualityControl.

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan indeks korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

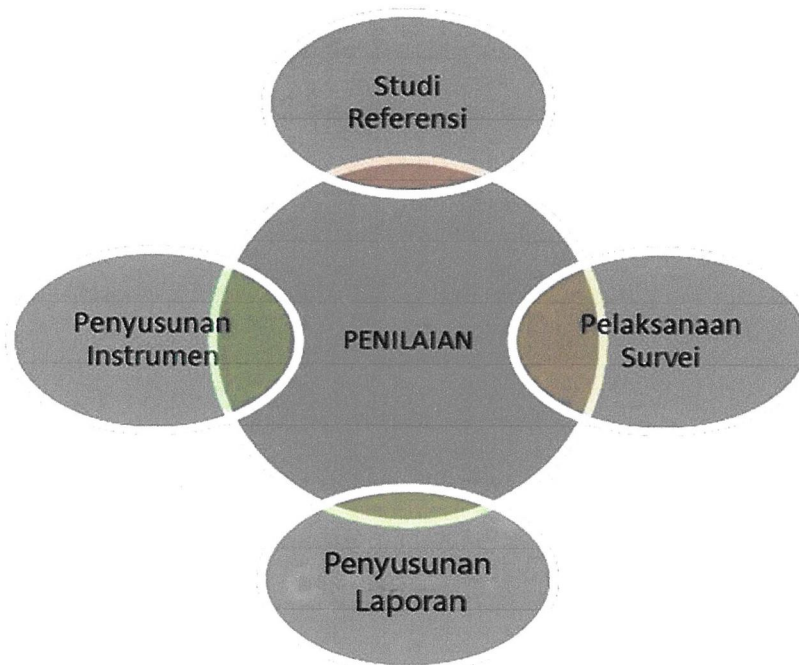
Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2

Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

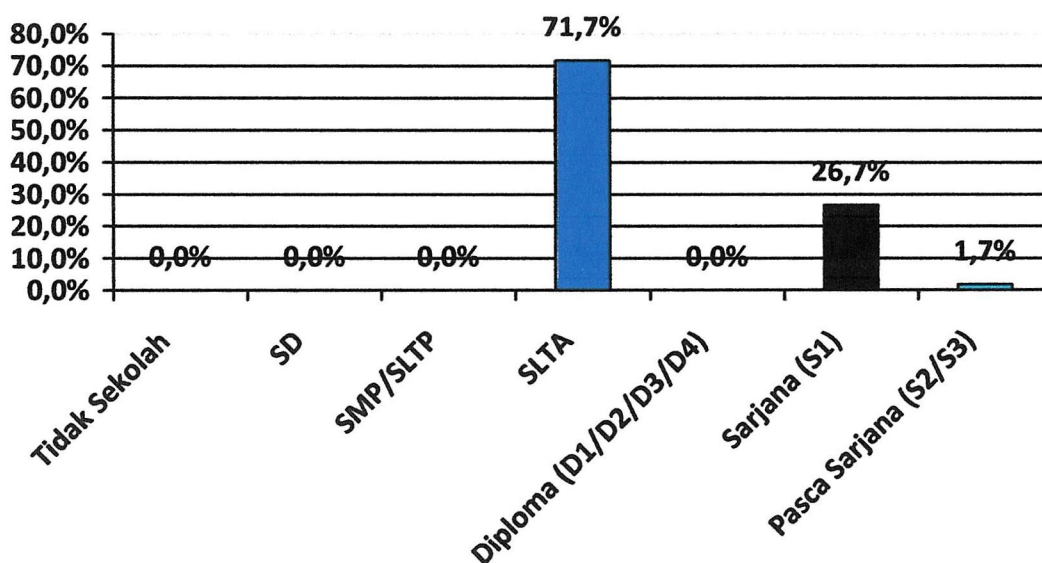
3.1. Profilresponden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki terakhir SLTA adalah 77responden dengan persentase 51,3 %.

Tabel 4.
Tingkat pendidikan responden

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	Tidak Sekolah	0	0
2	SD	1	0
3	SMP / SLTP	0	0
4	SLTA	106	71,7
5	Diploma (D1/D2/D3/D4)	2	0
6	Sarjana (S1)	51	26,7
7	Pasca Sarjana (S2/S3)	3	1,7
Jumlah		163	100.0

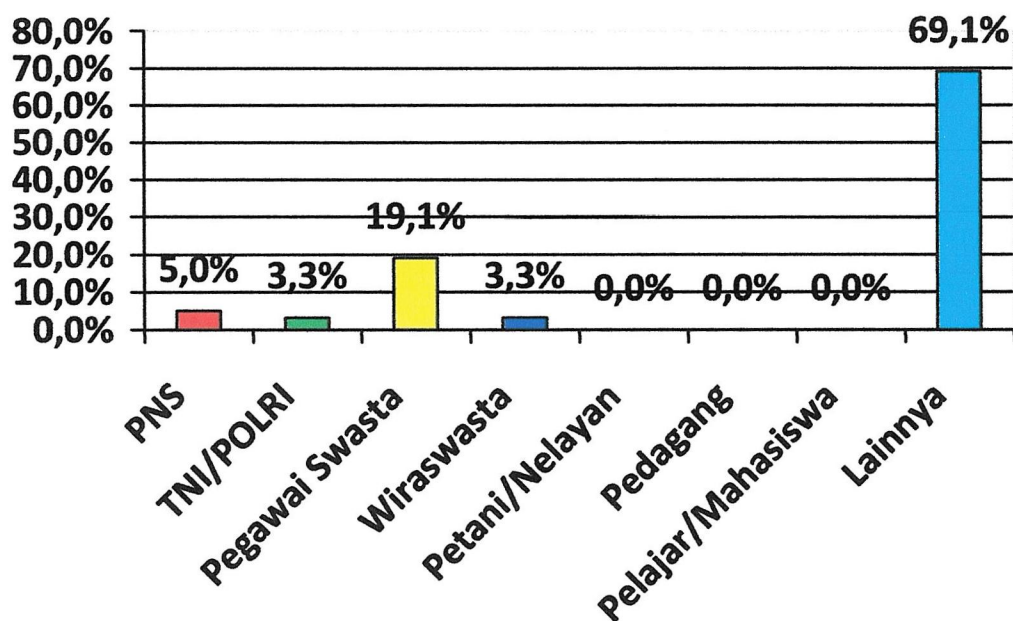


3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 42,7% responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan memiliki pekerjaan sebagai Pelajar / Mahasiswa.

Tabel 5.
Jenis pekerjaan responden

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	%
1	PNS	6	5
2	TNI/POLRI	4	3,33
3	Pegawai Swasta	23	19,16
4	Wiraswasta	4	3,33
5	Petani / Nelayan	0	0,0
6	Pedagang	0	0,0
7	Pelajar / Mahasiswa	0	0,0
8	Lainnya	83	69,16
Jumlah		120	100.0

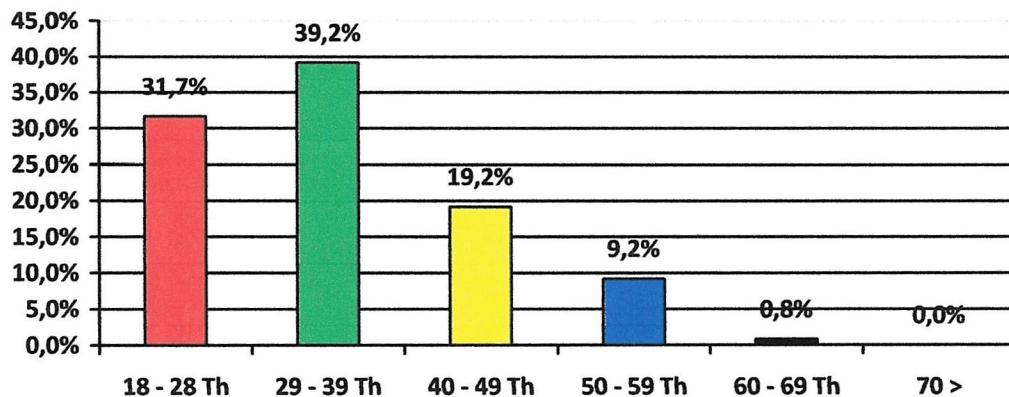


3.1.3. Kelompok usiaresponden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 20 tahun s/d 30 tahun. Bagi kelompok usia di atas 41 tahun, jumlah responden semakin mengecil, demikian pula kelompok usia di bawah 31 tahun.

Tabel 6.
Usia responden

No	Umur	Frekuensi	%
1	18 – 28 Th	38	31,7
2	29 – 39 Th	47	39,2
3	40 – 49 Th	23	19,2
4	50 – 59 Th	11	9,2
5	60 - 69 Th	1	0,8
6	70>	0	0
Jumlah		120	100.0



3.2. Indeks persepsi korupsi perindikator.

3.2.1 Indikator Manipulasi Peraturan

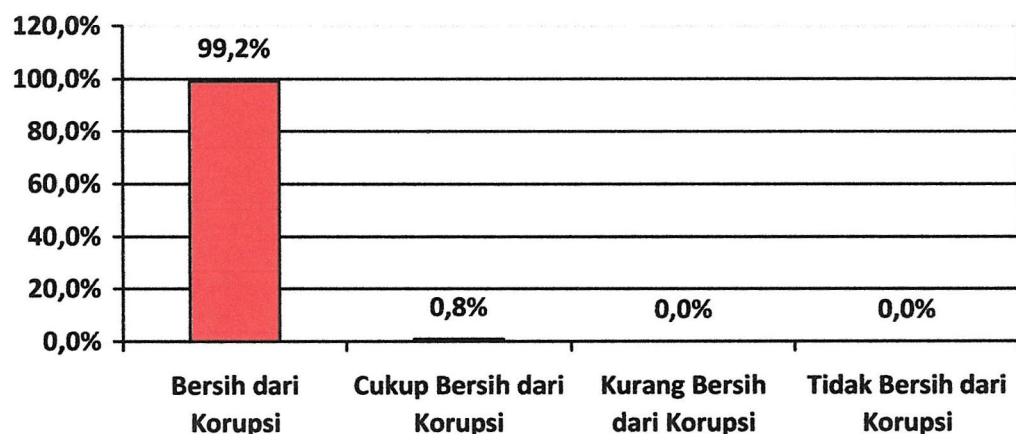
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 3,992

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari manipulasi peraturan.

Tabel 7.

Indeks pada indikator manipulasi peraturan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	119	99,2
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	1	0,8
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	0	0,0
4.	Tidak Bersih dari Korupsi	1	0	0,0
Jumlah			120	100.0



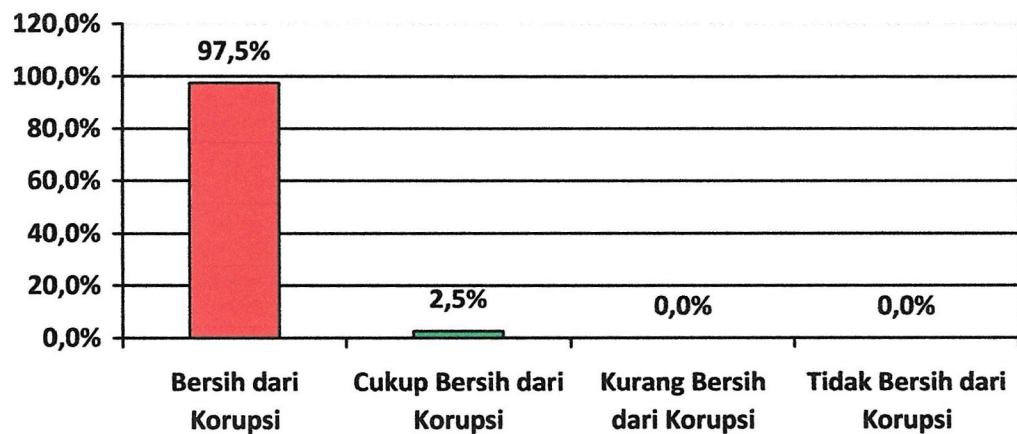
3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan.

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 3,975

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Penyalahgunaan Jabatan.

Tabel 8.
Indeks pada penyalahgunaan jabatan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	117	97,5
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	3	2,5
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	0	0,0
4.	Tidak Bersih dari Korupsi	1	0	0,0
Jumlah			120	100.0



3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh.

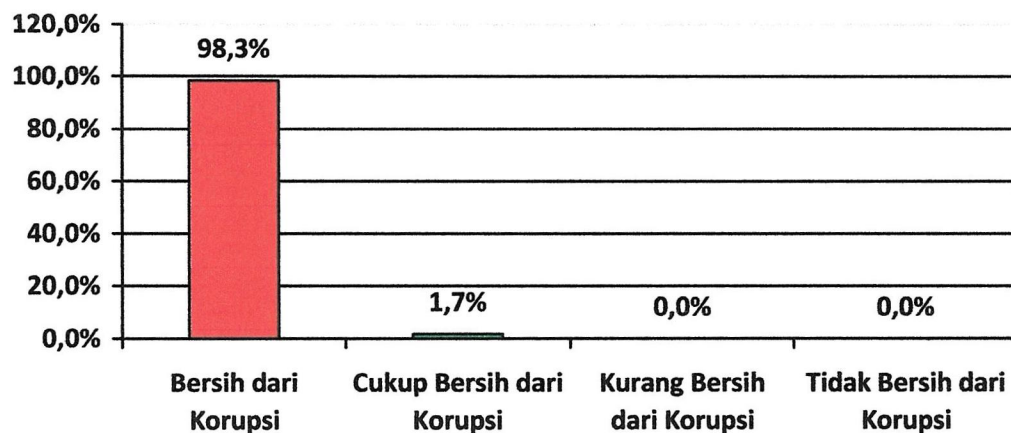
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 3,983

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dan tidak ada yang menjual pengaruh di satuankerja.

Tabel 9.

Indeks pada indikator menjual pengaruh

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	118	98,3
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	2	1,7
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	0	0,0
4.	Tidak Bersih dari Korupsi	1	0	0,0
Jumlah			120	100.0



3.2.4. Indikator TransaksiBiaya

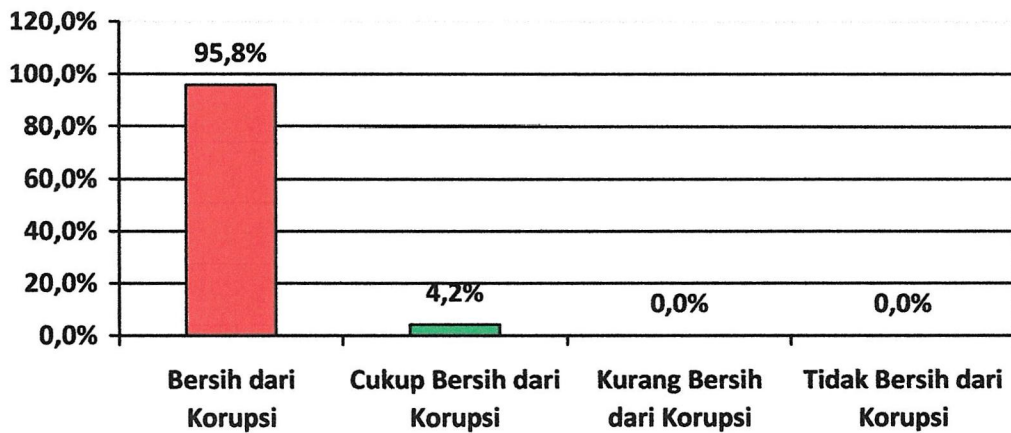
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 3,958

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan tidak ada transaksi rahasia.

Tabel 10.

Tabel indeks pada indikator transaksi biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	115	95,8
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	5	4,2
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	0	0,0
4.	Tidak Bersih dari Korupsi	1	0	0,0
Jumlah			150	100.0



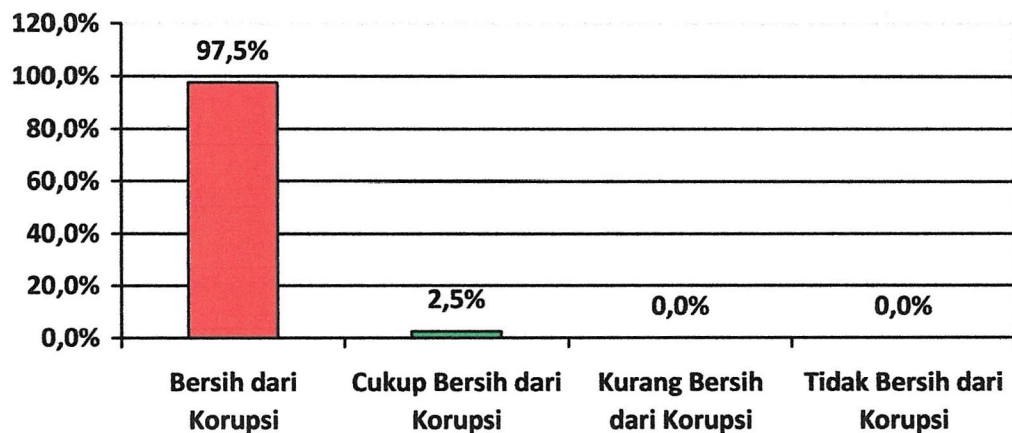
3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 3,975

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan tidak menerapkan adanya biaya tambahan.

Tabel 11.
Indeks pada indikator biaya tambahan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	117	97,5
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	3	2,5
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	0	0,0
4.	Tidak Bersih dari Korupsi	1	0	0,0
Jumlah			120	100.0

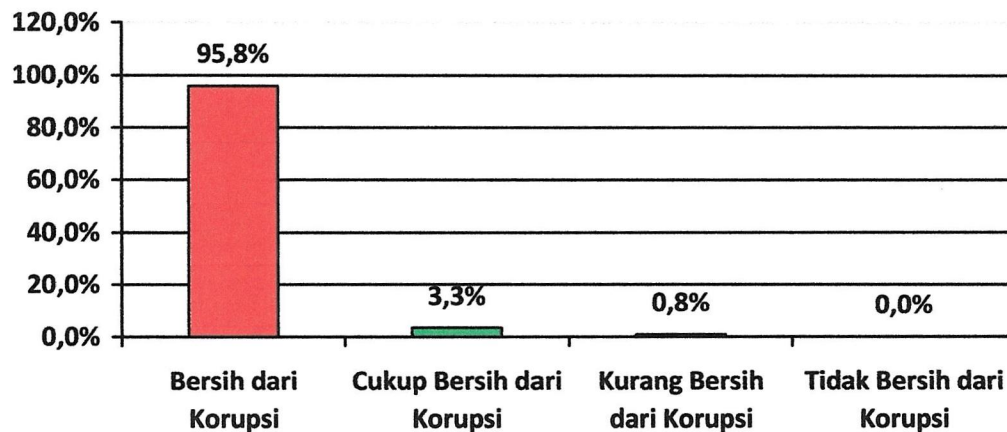


3.2.6. Indikator Hadiah.

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 3,942 Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan tidak menerima hadiah dari pihak manapun.

Tabel 12.
Indeks pada indikator hadiah

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	115	95,8
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	4	3,3
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	1	0,8
4.	Tidak Bersih dari Korupsi	1	0	0,0
Jumlah			120	100.0



3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

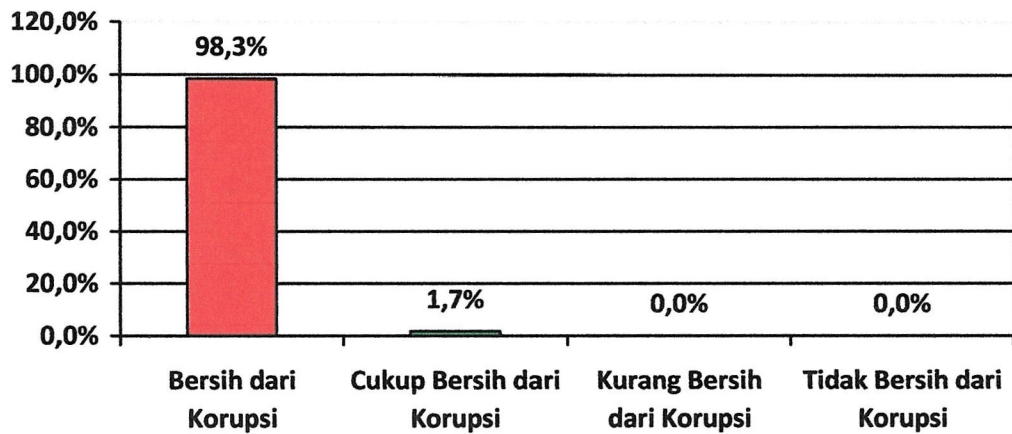
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index 3,983

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan transparan dalam pengelolaan pembiayaan.

Tabel 13.

Indeks pada indikator transparansi biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	118	98,3
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	2	1,7
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	0	0,0
4.	Tidak Bersih dari Korupsi	1	0	0,0
Jumlah			120	100.0

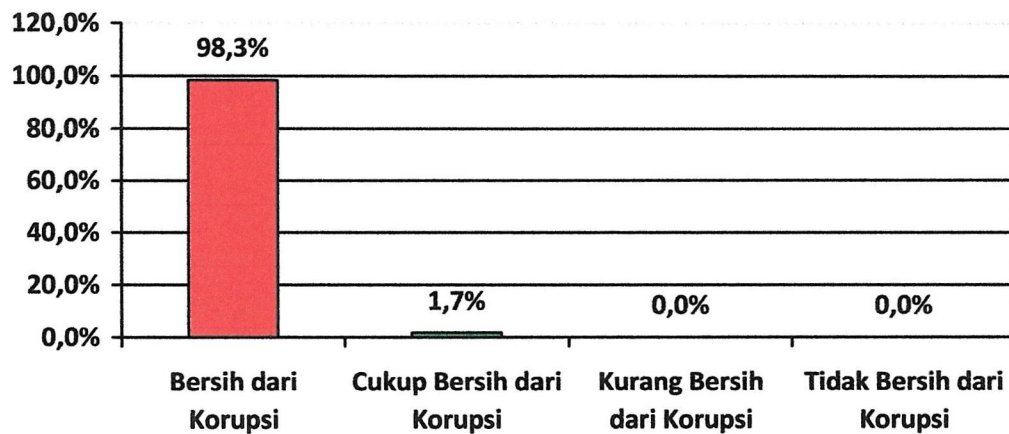


3.2.8. Indikator Percaloan.

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 3,983 Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari tindakan Percaloan.

Tabel 14.
Indeks pada indikator percaloan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	118	98,3
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	2	1,7
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	0	0,0
4.	Tidak Bersih dari Korupsi	1	0	0,0
Jumlah			120	100.0



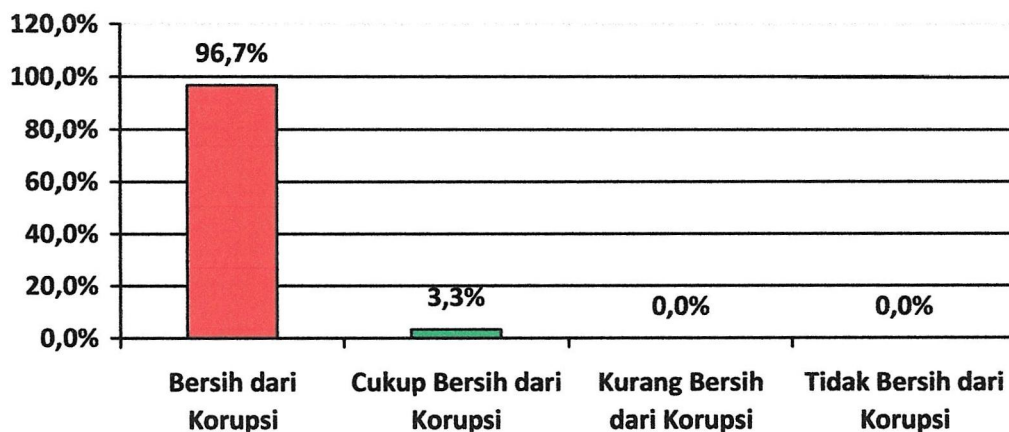
3.2.9. Indikator Perbuatan Curang.

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 3,967

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari perbuatan curang.

Tabel 15.
Indeks pada indikator perbuatan curang

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	116	96,7
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	4	3,3
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	0	0,0
4.	Tidak Bersih dari Korupsi	1	0	0,0
Jumlah			120	100.0



3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia.

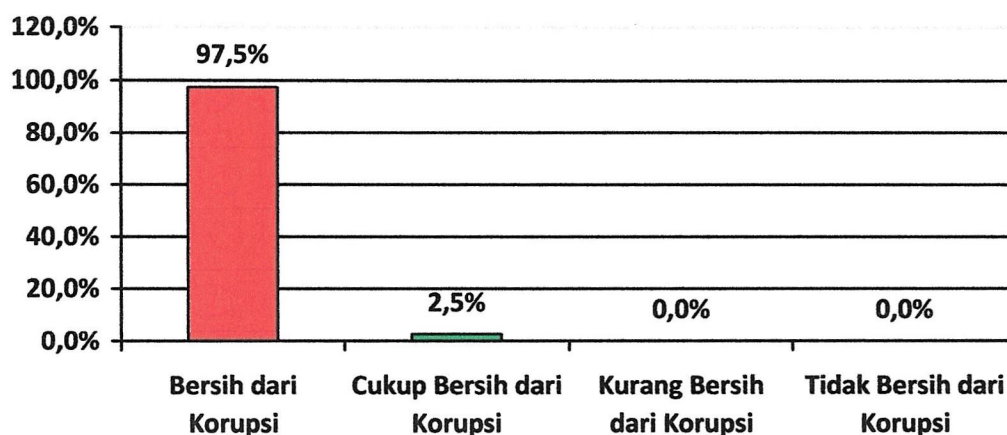
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 3.975

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari adanya benturan kepentingan.

Tabel 16.

Indeks pada indikator Transaksi Rahasia

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	117	97,5
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	3	2,5
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	0	0,0
4.	Tidak Bersih dari Korupsi	1	0	0,0
Jumlah			120	100.0

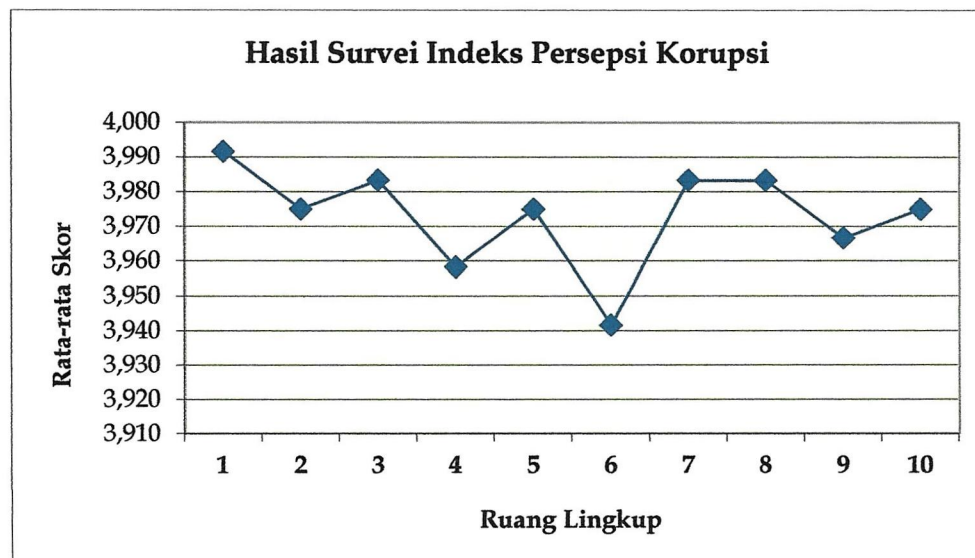


3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja padapengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kab. Kediri sebesar 93,27.

Tabel 17.
Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Negeri Kab. Kediri

Ket	Indikator										
	Manipulasi Peraturan	Penyalahgunaan Jabatan	Menjual Pengaruh	Transaksi Biaya	Biaya Tambahan	Hadiah	Transparansi Biaya	Percaloon	Perbuatan Curang	Transaksi Rahasia	
Jumlah	963	477	478	475	477	473	478	478	476	477	
NRR per RL	3,992	3,975	3,983	3,958	3,975	3,942	3,983	3,983	3,967	3,975	
NRR Tertimbang	0,399	0,398	0,398	0,396	0,398	0,394	0,398	0,398	0,397	0,398	3,973
NILAI PERSEPSI KORUPSI											99,33



Indeks 99,33 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 81,26 – 100,00

Tabel 18.
Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Negeri Kab. Kediri

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidakbersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari Korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut:

Tabel 19.
Isian masukan dan pandangan pengguna layanan
Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri
1	Agar biaya yang diperlukan untuk setiap jenis pelayanan bisa diakses secara publik dan transparan
2	Agar informasi perkara secara online lebih

	disosialisasikan.
3	Agar prosedur pelayanan lebih diperjelas.
4	Kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang dikenakan agar lebih ditekankan.
5	Agar syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, bisa lebih dipermudah.
6	Agar penegakan hukum dalam penanganan korupsi lebih ditingkatkan.

3.5. Hasil Survei Kualitatif

Hasil survei kualitatif pada penelitian ini diperoleh dari hasil saran-saran responden yang ditulis di dalam angket yang telah disebar. Saran-saran perbaikan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas IA, yang diusulkan responden, adalah sebagai berikut :

1. Sangat baik dan bagus.
2. Para pegawai dan staf nya sangat baik.
3. Tindakan dan responsible pegawai sangat responsive.
4. Pegawainya informatif.
5. Baik dan bagus.
6. Pegawai dan orang-orang nya baik dan ramah.
7. Petugasnya ramah dan baik.
8. PTSP Pidana ramah dan murah senyum.
9. Cepat, sigap dan ramah bagian satpam dan informasinya.
10. Ramah dan baik.
11. Terbaik dan ramah ;
12. Pelayanan depannya mudah dan ramah .
13. Pengambilan surat putusan sangat mudah.
14. Petugas ramah.
15. Baik ;
16. Baik .

17. Baik .
18. Baik
19. Baik ;
20. Baik .
21. Baik .
22. Baik .
23. Baik ;
24. Baik ;
25. Baik .
26. Baik.
27. Baik .
28. Baik .
29. Baik.
30. Baik.
31. Baik .
32. Matursuwun.
33. Mantap.
34. Baik;.
35. Baik
36. Baik.
37. Baik.
38. Baik.
39. Bagus.
40. Bagus.
41. Terbaik .
42. Pelayanan Ramah .
43. Terbaik .
44. Penyampaian informasi jelas.
45. RAMAH DAN TERBUKA
46. RAMAH DAN CEPAT.
47. TERBAIK.

48. RAMAH;
49. Pelayanan sudah baik;
50. Proses pengambilan cepat.
51. Petugas ramah- ramah .
52. Petugas PTSP dan satpam ramah
53. Memberikan informasi sangat jelas.
54. Mengurus legalisir cepat ;
55. Pelayannan Ramah.
56. Petugas Ramah .
57. Proses persyaratan sangat mudah .
58. Kantor Pengadilan sudah sangat baik;
59. Petugas dan satpam informasi ramah.
60. Proses cepat.
61. Dipertahankan anti KKN;.
62. Ditingkatkan lagi.
63. Tidak ada pungli di Pengadilan.
64. Pelayanan bagian informasi dan PTSP ramah dan terbuka.
65. Terbuka dan akuntable serta mudah dipahami penjelasannya bagian hukum.
66. Baik dan ramah satpam dan PTSPnya.
67. BAIK DAN RAMAH MELAYANI .
68. CEPAT DAN RAMAH
69. RAMAH DAN MUDAH;.
70. PELAYANAN DISINI CUKUP MUDAH;.
71. PELAYANAN DISINI CEPAT DAN MUDAH.
72. Cepat dan ramah bagian informasi dan satpamnya.
73. Cepat dan ramah.
74. PTSP PERDATA MUDAH DALAM MENJELASKAN.
75. PTSP PIDANA RAMAH DAN SABAR.
76. Ptsp pidana ramah dan sabar.
77. Proses pembuatan surat kuasa cepat.

78. Petugas ramah .
79. Penjelasan sangat mudah dipahami.
80. RAMAH,... DAN TERBUKA.
81. SATPAMNYA RAMAH DAN BAGIAN PTSPNYA MUDAH DIMENGERTI PENJELASANNYA.
82. SATPAMNYA RAMAH DAN SABAR .
83. TERBUKA DAN LUGAS.
84. RAMAH DAN SABAR.
85. dipertahankan.
86. Ditingkatkan lagi.
87. dipertahankan.
88. Ditingkatkan terus.
89. PELAYANAN SANGAT BAIK.
90. PELAYANAN BAIK SEKALI.
91. Terbaik dan ramah
92. Terbaik dan ramah.
93. Terbaik.
94. Ramah dan sigap
95. Ramah dan sigap pelayanannya .
96. SUDAH BAIK;
97. Meengurus keterangan tidak pernah dipidana sangat mudah.
98. Proses legalisir cepat.
99. Persyaratan gampang.
100. Mengantar berkas sita geledah.
101. Mengurus pembatalan akte sangat mudah.
102. Mengajukan permohonan.
103. Pelayanan cepat.
104. Petugas ramah.
105. Proses pengambilan legalisir cepat.
106. Pengambilan hasil putusan sidang cepat.
107. dipertahankan.
108. Dipertahankan dan ditingkatkan.
109. mantap;.
110. Ditingkatkan lagi.
111. dipertahankan.

112. Dipertahankan dan ditingkatkan ;
113. Baik, dan ditingkatkan lagi
114. Ambil putusan tidak menunggu lama.
115. Pelayanan ramah.
116. Untuk pengambilan putusan sidang sangat mudah.
117. Pelayanannya sangat baik.
118. Pelayanan dapat dimaksimalkan lagi Terimakasih.
119. RAMAH .. BAGIAN INFORMASINYA;
120. CEPAT TERBUKA--.
121. RAMAH ...
122. Terbaik ...
123. Petugas ramah
124. Pelayanan cepat dan mudah dipahami
125. Pelayanan sangat baik
126. Pelayanan baik
127. Prima ...
128. Cepat ...
129. Ramah ...
130. Terbaik ...
131. Untuk mengurus permohonan sangat mudah
132. Petugas sopan dan ramah
133. Mengajukan perbaikan nama sangat mudah
134. Pelayanan sangat baik
135. Terbaik ...
136. Cepat tepat ...
137. TERBAIK ...
138. Baik
139. Sudah baik tapi perlu ditingkatkan lagi
140. Mengajukan legalisir proses cepat
141. Mengajukan permohonan Ganti Nama sangat mudah
142. Untuk mengurus persyaratan perwalian sangat mudah
143. Pelayanan ramah dan sopan.
144. Pelayanan sangat baik dan cepat
145. Pelayanan sangat baik
146. RAMAH DAN TERBUKA
147. Pelayanan satpamnya ramah di meja informasi;

148. Cepat dan ringkas
149. Terbaik ..
150. Cepat, ringkas dan tanggap
151. Cepat dan transparan
152. Cepat dan ringkas
153. Proses pendaftaran pergantian tanggal lahir cepat
154. Proses sidang cepat
155. Untuk pelayanan hukum sangat ramah
156. RAMAH CEPAT RINGKAS
157. RAMAH ...
158. TERBAIK
159. Mengambil hasil putusan sidang sangat cepat
160. Proses sangat cepat
161. Pelayanan baik

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kab.Kediri diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri memiliki Indeks Persepsi Korupsi 99,40 **atau** masuk pada kategori BERSIH DARI KORUPSI. Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,982
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,988
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,988
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,963
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,951
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,957
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,988
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,975
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,975
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,994

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kab. Kediri Tahun 2022 bulan April s/d Juni tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 99,40 atau masuk pada persepsi 81,26 – 100,00. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Hadiah memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

126	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
127	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
128	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
129	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
130	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
131	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
132	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
133	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
134	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
135	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
136	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
137	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
138	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
139	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
140	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
141	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
142	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
143	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
144	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
145	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
146	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
147	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
148	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
149	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
150	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
151	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
152	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
153	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
154	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
155	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
156	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
157	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
158	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
159	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
160	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
161	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
162	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
163	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	
Jumlah	1133	650	650	646	644	645	650	648	648	651	
NRR per RL	3,982	3,988	3,988	3,963	3,951	3,957	3,988	3,975	3,975	3,994	
NRR Tertimbang	0,398	0,399	0,399	0,396	0,395	0,396	0,399	0,398	0,398	0,399	3,976
NILAI PERSEPSI KORUPSI											99,40

Keterangan :

- RL = Ruang Lingkup Persepsi Korupsi
- NRR = Nilai rata-rata
- IKM = Indeks Persepsi Korupsi
- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
NRR Per RL = Jumlah nilai per Indikator dibagi dengan jumlah kuesioner yang terisi
NRR tertimbang = NRR per Indikator x (1/10)

INDEKS PERSEPSI KORUPSI : 99,40

Kategori: BERSIH DARI KORUPSI

Nilai Persepsi Korupsi :

- 4 (Bersih dari Korupsi) : 81,26 - 100,00 : 3,26 - 4,00
3 (Cukup Bersih dari Korupsi) : 62,51 - 81,25 : 2,51 - 3,25
2 (Kurang Bersih dari Korupsi) : 43,76 - 62,50 : 1,76 - 2,50
1 (Tidak Bersih dari Korupsi) : 25,00 - 43,75 : 1,00 - 1,75

Tabel

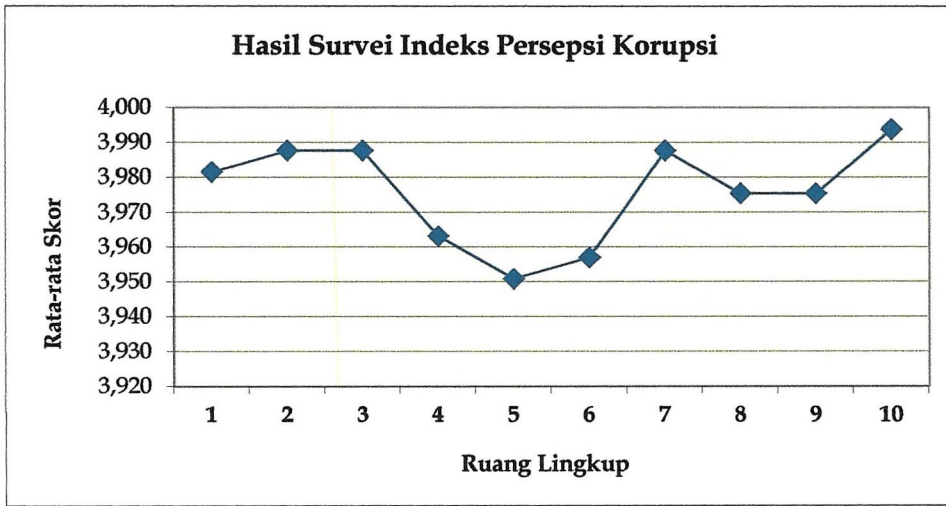
RINGKASAN SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI

Survey Indeks Persepsi Korupsi:

99,40

Kategori: BERSIH DARI KORUPSI

Nomor	Ruang Lingkup / Indikator	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Manipulasi Peraturan	3,982	Sangat Baik	5
2	Penyalahgunaan Jabatan	3,988	Sangat Baik	2
3	Menjual Pengaruh	3,988	Sangat Baik	2
4	Transaksi Biaya	3,963	Sangat Baik	8
5	Biaya Tambahan	3,951	Sangat Baik	10
6	Hadiah	3,957	Sangat Baik	9
7	Transparansi Biaya	3,988	Sangat Baik	2
8	Percaloan	3,975	Sangat Baik	6
9	Perbuatan Curang	3,975	Sangat Baik	6
10	Transaksi Rahasia	3,994	Sangat Baik	1



KETUA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

RUDITA SETYA HERMAWAN, SH., MH.
NIP. 19780617 200112 1 002

KETUA TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI

H. RADEN WIYONO, SH., MH.
NIP. 19630703 198803 1 003

PEMBINA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI



ASEP KOSWARA, SH., MH.
NIP. 19681208 199403 1 001



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI KAB. KEDIRI
 Jl Pamenang No. 60 Gampeng Rejo, KAB. KEDIRI
 JAWA TIMUR
<http://www.pn-kedirikab.go.id/>



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
 Periode 1 April 2022 sampai 30 Juni 2022

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS

3,98 / 99,40%

Jumlah	163 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 92 PEREMPUAN : 71	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 0 SD : 1 Diploma 3 : 0 SMP : 0 S1 : 51 SMU : 106 S2 : 2 Diploma 1 : 2 S3 : 1	
Pekerjaan	PNS : 8 SWASTA : 41 TNI : 0 WIRUSAHA : 11 POLRI : 19 TENAGA KONTRAK : 3 LAINNYA : 81	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?	3,951
2. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?	3,957
3. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?	3,963

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur:

1. Pembayaran sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan, dengan nilai rata-rata 3,951 kategori sangat bersih dari korupsi;
2. Indikator tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan Negeri (meskipun tidak diminta), dengan nilai rata-rata 3,963 kategori sangat bersih dari korupsi;
3. Kemudahan dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan, dengan nilai rata-rata 3,963 kategori sangat bersih dari korupsi;

Tindak lanjut dari 3 unsur terendah dari hasil laporan monitoring Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Triwulan II Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Indikator pembayaran sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan
 - Pimpinan Pengadilan Negeri Kab. Kediri mengoptimalkan peran petugas PTSP (kasir) untuk memberikan penjelasan yang selengkapnyanya mengenai biaya-biaya yang dikenakan kepada pihak yang datang ke Pengadilan dan memerlukan informasi tentang biaya/tarif secara transparan dan jelas;
2. Indikator Tanda terima kasih atas layanan
 - Pimpinan Negeri Kab. Kediri mengingatkan kepada seluruh ASN agar tidak menerima dan meminta apapun kepada para pencari keadilan;
 - Pimpinan Pengadilan Negeri Kab. Kediri mengatakan untuk menjadikan pengadilan sebagai wadah/tempat yang bersih untuk mencari keadilan bagi siapapun;
 - Pimpinan Pengadilan Negeri Kab. Kediri mengatakan jikalau ada yang memberikan tanda terima kasih atas kemauan sendiri agar menerimanya berdasarkan undang-undang yang berlaku;
1. Kemudahan dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan
 - Pimpinan Pengadilan Negeri Kab. Kediri menekankan kepada pihak bersangkutan agar selalu memperbaharui pengumuman yang ada di website maupun di meja PTSP
 - Pimpinan Pengadilan Negeri Kab. Kediri menyampaikan agar pegawai PTSP memberitahukan tarif yang benar sesuai dengan SOP dan Ketentuan Perundang-Undangan;

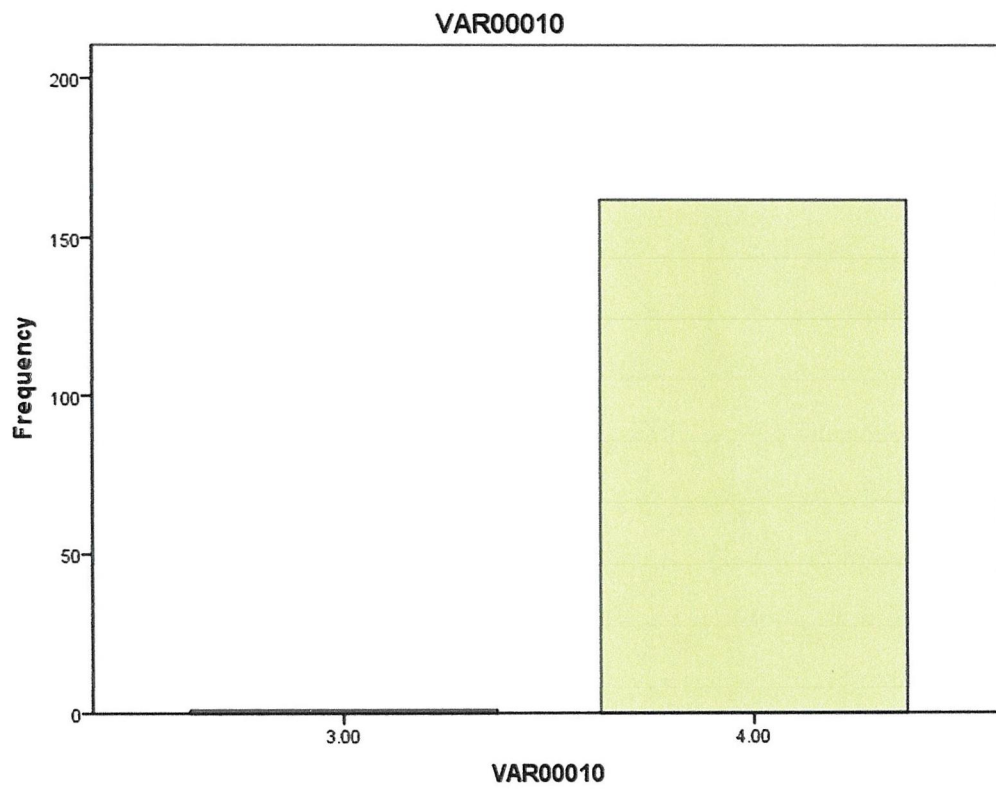
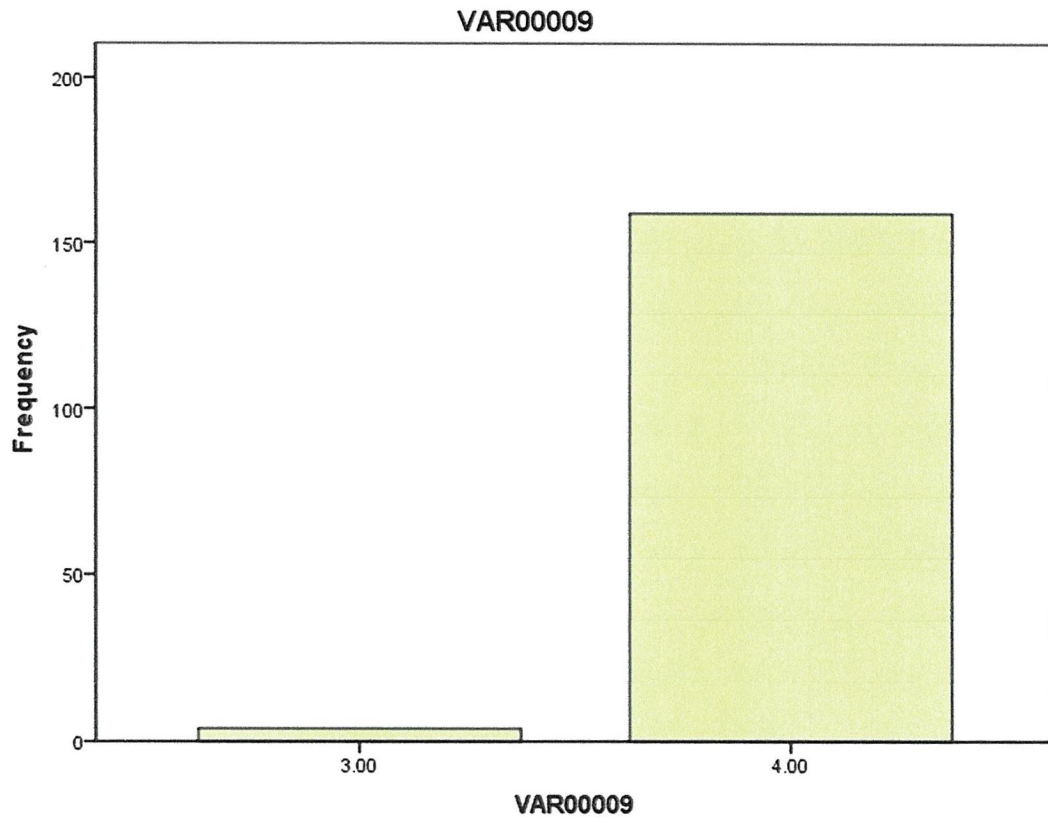
Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

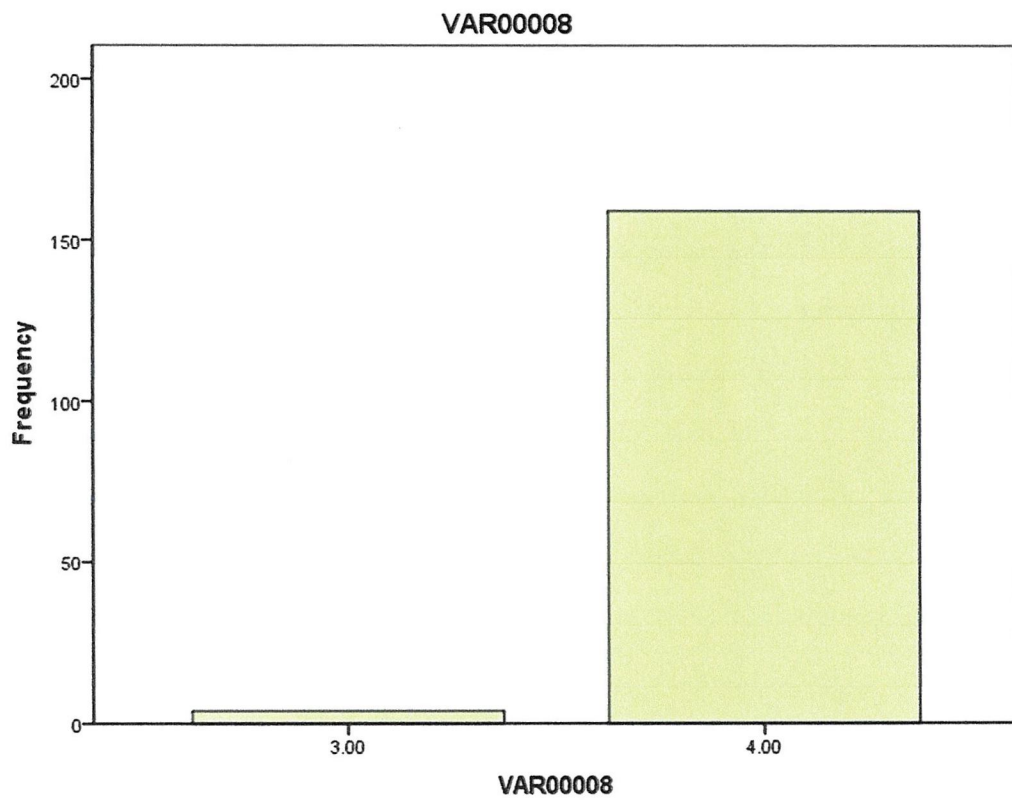
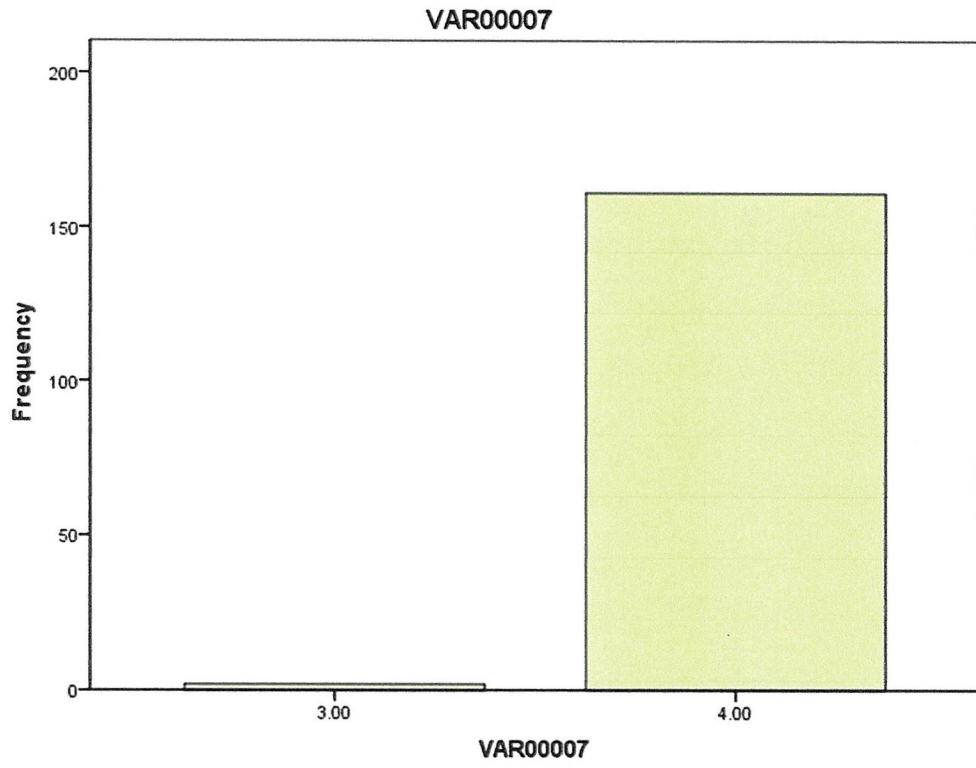
30 Juni 2022
Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

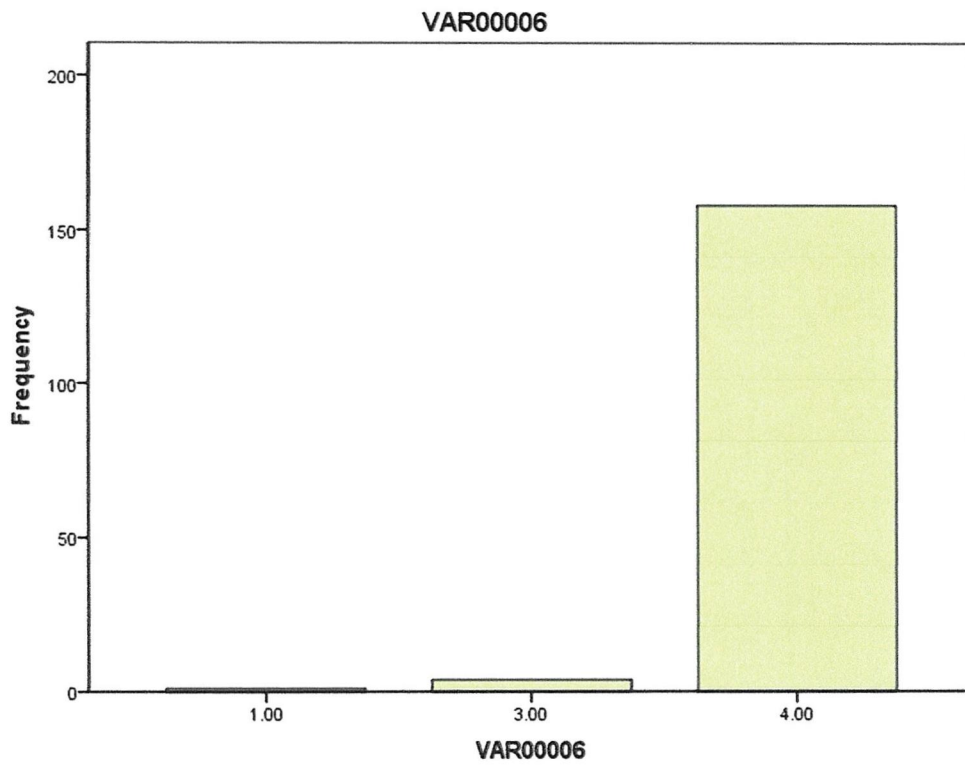
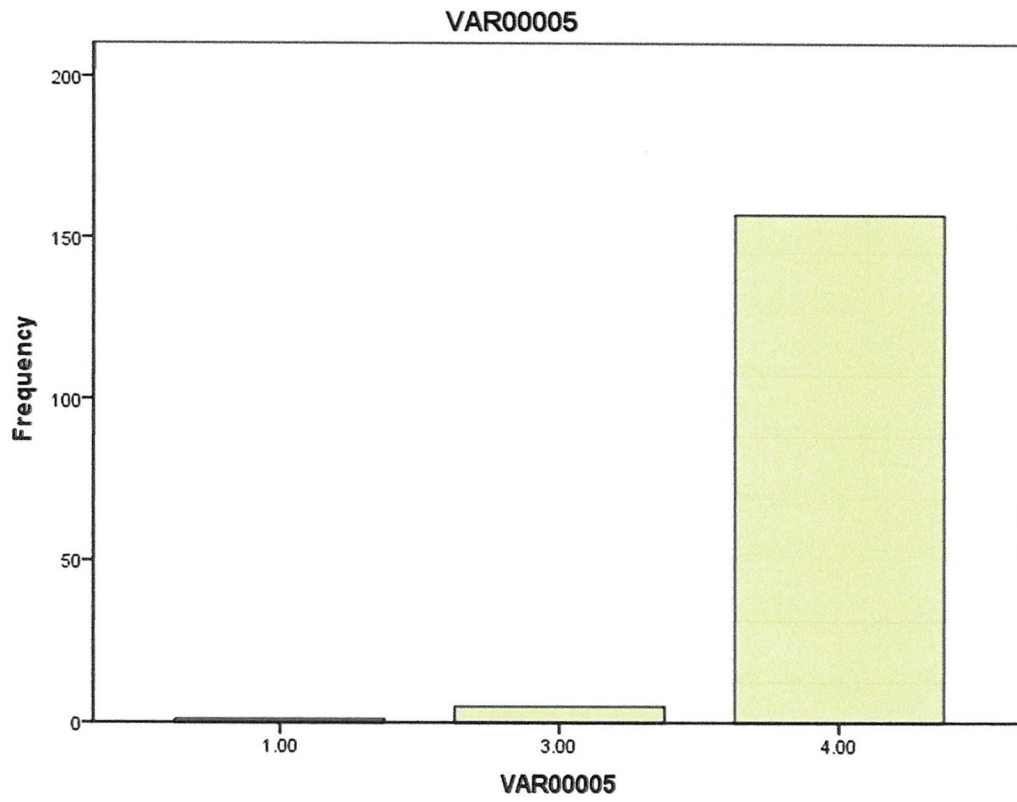
ASEP KOSWARA, S.H., M.H.
NIP. 19681208 199403 1 001

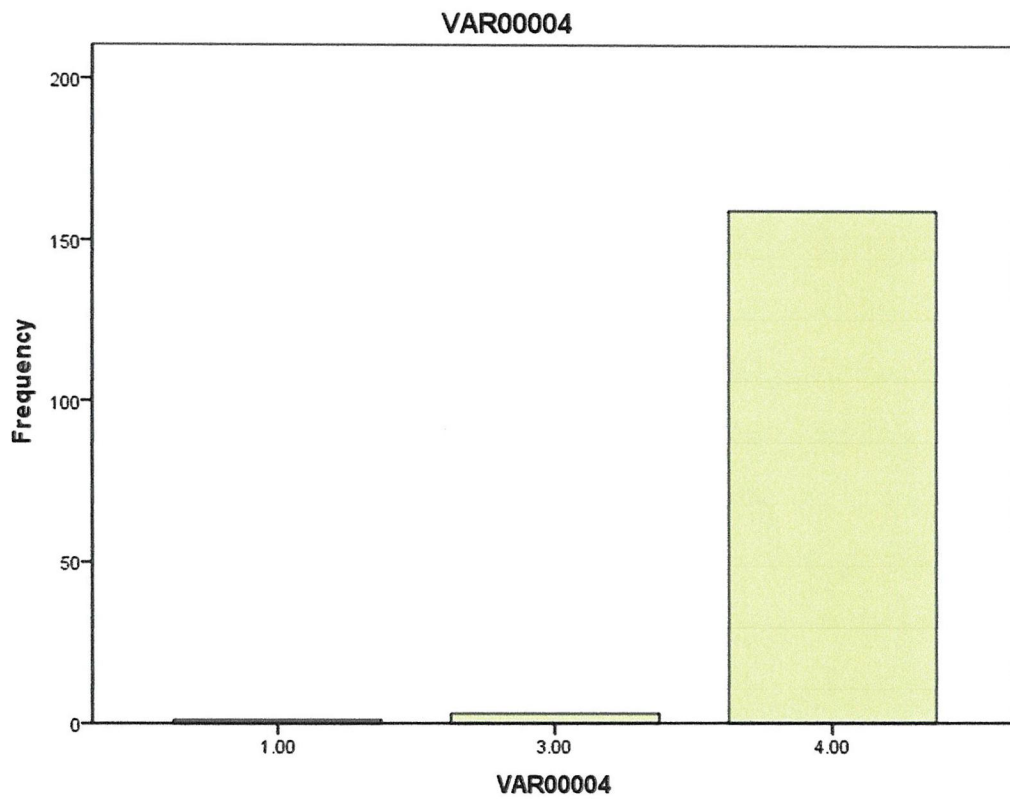
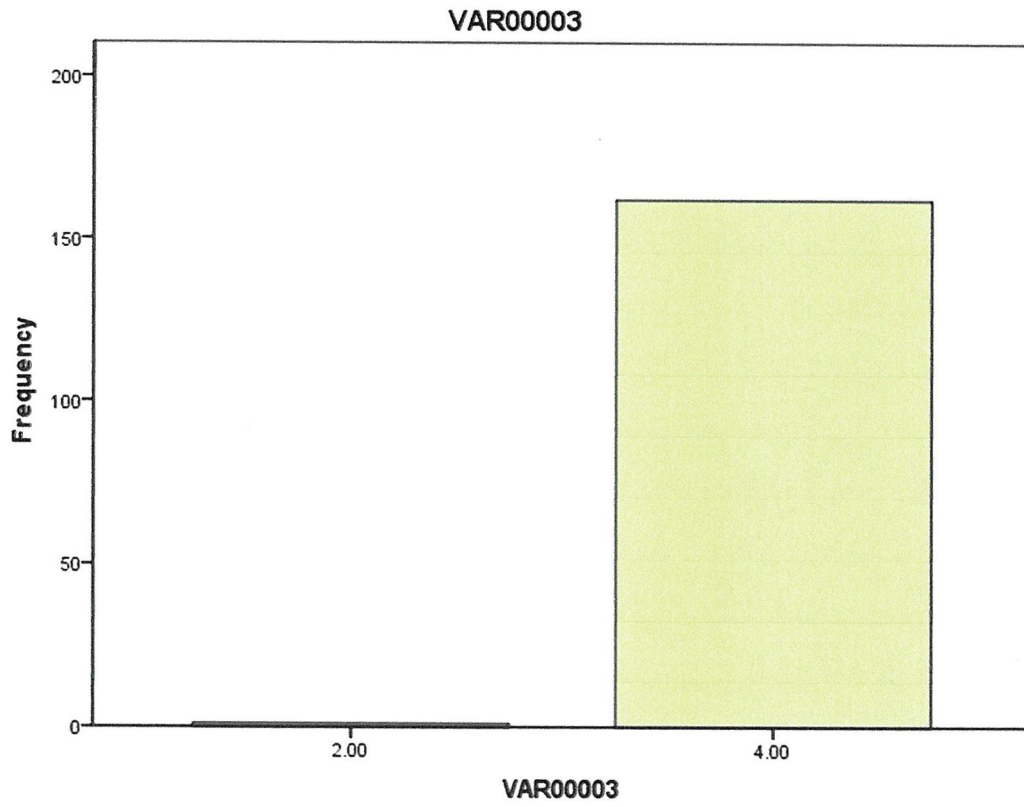
Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

19 September
2022
Ketua
Pengadilan
Negeri

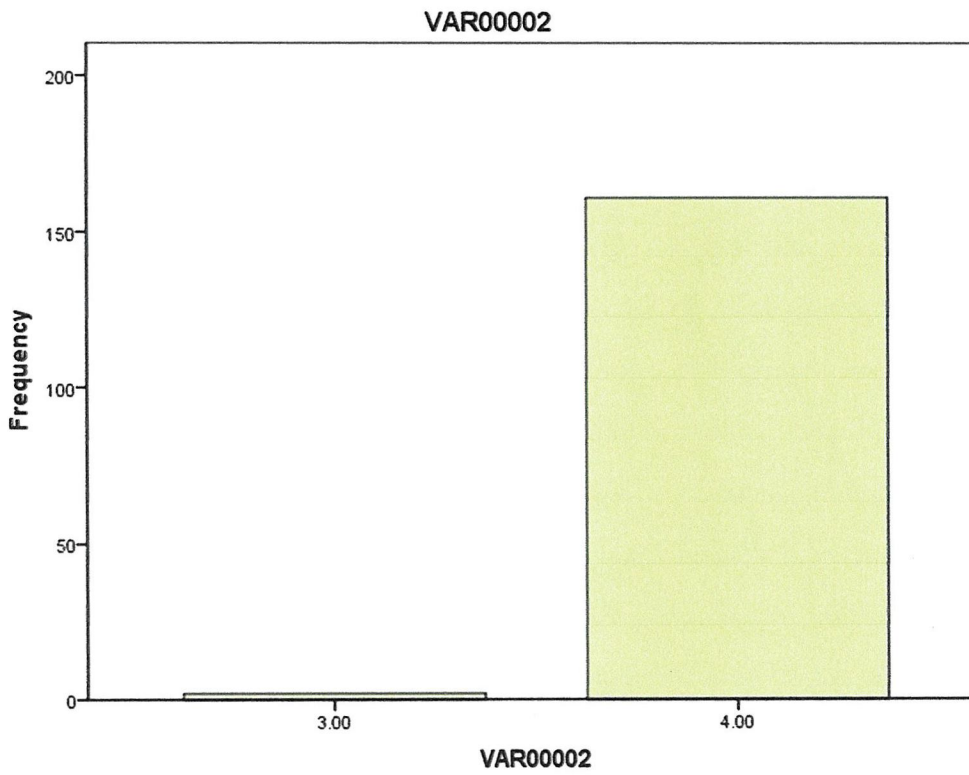
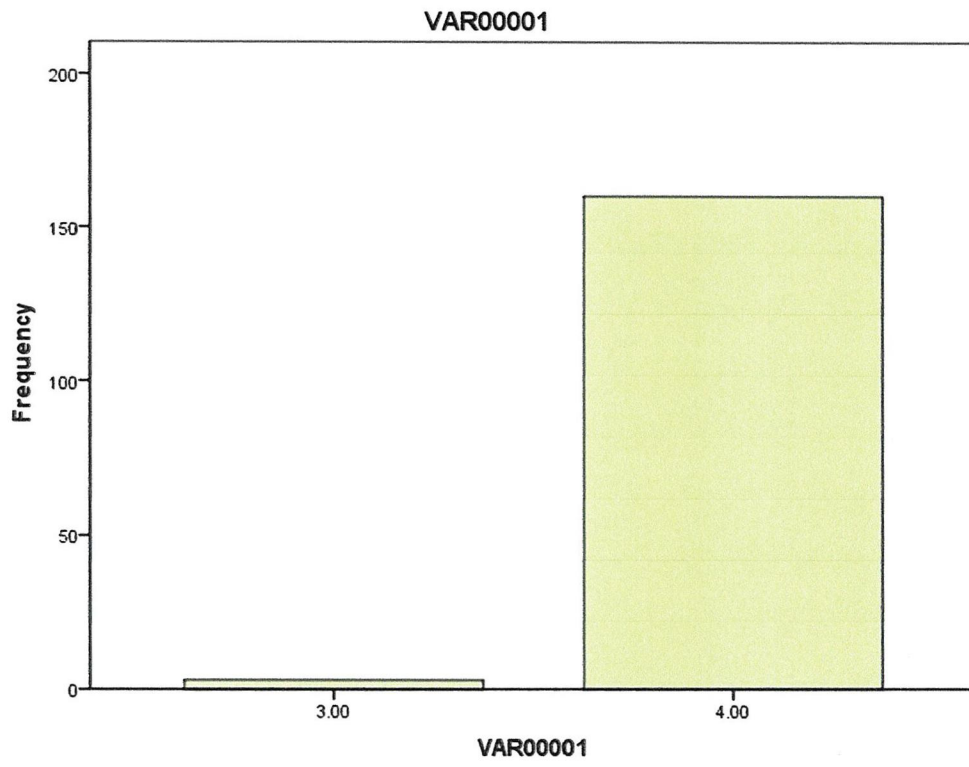








Bar Chart



VAR00006

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	.6	.6	.6
	3.00	4	2.5	2.5	3.1
	4.00	158	96.9	96.9	100.0
	Total	163	100.0	100.0	

VAR00007

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	2	1.2	1.2	1.2
	4.00	161	98.8	98.8	100.0
	Total	163	100.0	100.0	

VAR00008

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	4	2.5	2.5	2.5
	4.00	159	97.5	97.5	100.0
	Total	163	100.0	100.0	

VAR00009

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	4	2.5	2.5	2.5
	4.00	159	97.5	97.5	100.0
	Total	163	100.0	100.0	

VAR00010

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	1	.6	.6	.6
	4.00	162	99.4	99.4	100.0
	Total	163	100.0	100.0	

ANALISIS DATA SPAK TRIWULAN II
BULAN APRIL - JUNI TAHUN 2022
DENGAN NILAI INDEKS 3,98 / 99,40 %

Frequency Table

VAR00001

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	3	1.8	1.8	1.8
	4.00	160	98.2	98.2	100.0
	Total	163	100.0	100.0	

VAR00002

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	2	1.2	1.2	1.2
	4.00	161	98.8	98.8	100.0
	Total	163	100.0	100.0	

VAR00003

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	.6	.6	.6
	4.00	162	99.4	99.4	100.0
	Total	163	100.0	100.0	

VAR00004

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	.6	.6	.6
	3.00	3	1.8	1.8	2.5
	4.00	159	97.5	97.5	100.0
	Total	163	100.0	100.0	

VAR00005

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	.6	.6	.6
	3.00	5	3.1	3.1	3.7
	4.00	157	96.3	96.3	100.0
	Total	163	100.0	100.0	